

PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA KELURAHAN BERBASIS KARAKTERISTIK WILAYAH

Arief Zubaidy¹, Yogi Handoyo W.²

Bidang Perencanaan dan Pelaporan Kota Malang

Email: zubaidy70@gmail.com, dalev.bappeda123@gmail.com

Abstrak: Setiap negara memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda-beda didalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan wilayah sendiri pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap alokasi anggaran. Pemeran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil kepada masyarakat salah satunya dengan menggunakan system perpajakan. Kota Malang dengan penduduk hampir 900 ribu jiwa yang tersebar di 57 kelurahan smenjadi salah satu pusat perekonomian Jawa Timur. Selain itu, Kota Malang merupakan kota pendidikan dan menajdi tujuan wisata utama di Jawa Timur. seiiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian maka permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan tentunya beban layanan yang diberikan juga semakin meningkat. Guna mewujudkan, peneliti menggunakan metode penelitian *Mixed Methods Research* dengan pengambilan data kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif didukung dengan deskriptif kuantitatif. Sehingga tujuan penelitian untuk penyusunan. Hal ini membawa kosekuensi terhdap kebutuhan pedanaan yang meningkat pula. untuk menyusun formula di dalam menentukan besaran transfer keuangan kepada kelurahan berdasarkan pertimbangan dan analisis akademis dengan didukung oleh telaah empiris dan teoritis secara komprehensif.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Berbasis Karakteristik Wilayah, Kota Malang

Abstract: Each country has different development policies in an effort to improve the welfare of its people. In the concept of regional development itself the government has issued policy towards budget allocation. The role of government in distributing income and kekayaan sister to the public one of them by using the tax system. Malang City with a population of nearly 900 thousand people spread in 57 villages smenjadi one of the economic centers of East Java. In addition, the city of Malang is a city of education and menajdi major tourist destinations in East Java. along with population growth and economic activity, the problems faced are also increasingly complex. Kelurahan as the spearhead of the government of course the burden of service provided is also increasing. Guna realize, researchers use research methods *Mixed Methods Research* with quantitative and qualitative data retrieval. Qualitative descriptive analysis is supported by quantitative descriptive. So the purpose of research for the preparation. This brings the consequences to the increasing need for funding. to formulate a formula in determining the amount of financial transfers to the kelurahan based on academic considerations and analysis supported by comprehensive empirical and theoretical studies.

Keyword: Budget Planning, Based on Regional Characteristics, Malang City.

PENDAHULUAN

Hakikat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerinatah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum dalam konteks kebijakan publik, Pemerintah memiliki fungsi utama yaitu, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Di dalam kebijakan alokasi, pemerintah berperan di dalam menyediakan barang-barang public, dimana pasar atau swasta tidak mampu menyediakan barang-barang publik tersebut, seperti jalan umum, jembatan, udara bersih, taman publik, dan sebagainya. Sedangkan, fungsi distribusi terkait peran pemerintah di dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil bagi masyarakat, salah satu kebijakan yang dapat ditempuh adalah melalui sistem perpajakan. Sementara itu, fungsi stabilisasi terkait dengan peranan pemerintah di dalam menjaga stabilitas perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter.

Di setiap Negara memiliki kebijakan pembangunan yang berbeda-beda di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk Indonesia. Di era kemerdekaan sampai dengan orde baru, kebijakan pemerintah cenderung sentralistik, sedangkan di era reformasi kebijakan pemerintah berubah menjadi desentralistik atau

lebih dikenal dengan otonomi daerah. Di era kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar di dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sering disebut dengan desentralisasi. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga diimbangi dengan pelimpahan sebagian sumber penerimaan dan transfer keuangan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, kebijakan ini sering dikatan sebagai desentralisasi fiskal.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, penguatan kapasitas fiskal dimulai dari pemerintah provinsi sampai dengan tingkat pemerintah desa. Transfer pusat ke daerah dalam sistem perimbangan keuangan daerah diwujudkan dalam DAU, DAK, DBH, dan bentuk bantuan keuangan lainnya. Selain itu, khusus untuk pemerintah desa diberikan Dana Desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan penerapan Undang-undang tersebut, setiap desa mendapat dana sekitar Rp 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar, sesuai dengan hitungan formula yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa mendapatkan penguatan fiskal yang cukup besar selama 2 tahun terakhir, lalu bagaimana dengan kelurahan, dimana dalam hal ini kedudukannya setingkat dengan pemerintah desa.

Dalam PP No. 73 Tahun 20015 Tentang Kelurahan, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, pembentukan kelurahan harus memperhatikan syarat: a) jumlah penduduk; b) luas wilayah; c) bagian wilayah kerja; d) sarana dan prasarana pemerintahan. Berdasarkan kajian teoritis yang telah disampaikan maka dalam kajian ini penulis mencoba untuk menyusun sebuah formula alternative yang dapat digunakan untuk menentukan besaran transfer keuangan dari pemerintah kota kepada kelurahan. Harapannya akan terjadi asimetris transfer keuangan ke kelurahan dengan berdasar pada kebutuhan fiskal kelurahan. Penulis akan mencoba untuk menyusun indikator-indikator yang relevan untuk dimasukkan di dalam menyusun formula transfer keuangan ke kelurahan.

METODE

Metode dalam kajian ini yakni dengan *mix method*. Dalam metode ini didukung dengan data-data sekunder yang akurat dan dipertajam dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para ahli yang kompeten serta pejabat dilingkungan pemerintah Kota Malang. Data sekunder diperoleh melalui survey instansional dan didukung pula dengan studi literature untuk memperoleh teori-teori yang relevan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah dan sumber ilmiah lainnya. Dalam penulisan buku ini juga diperkuat dengan pengalaman-pengalaman di Negara lain di dalam melaukan formula transfer ke daerah sehingga beberapa hal dapat diadopsi di dalam menentukan formula terbaik untuk anggaran kelurahan. Metode analisis yang digunakan dengan *mix methode*, artinya di dalam analisis yang dilakukan menggunakan bauran analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk analisis perhitungan model formula yang akan digunakan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk merumuskan hasil wawancara guna mendukung hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

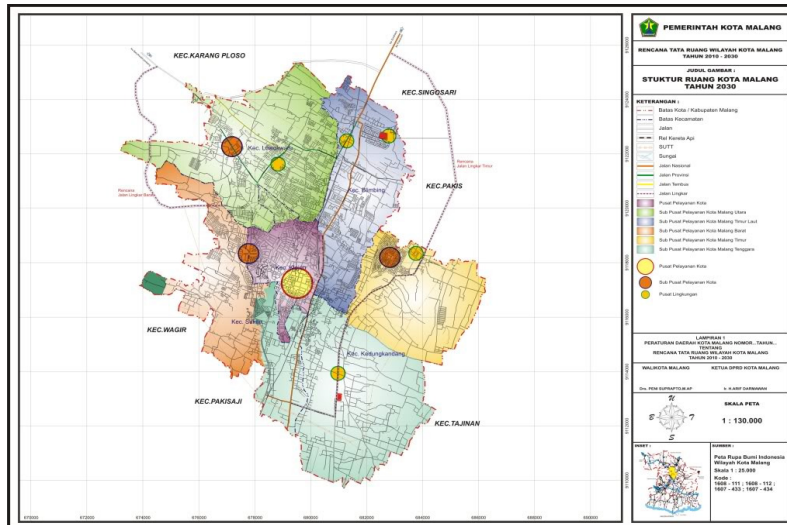
1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia dengan potensi wisata yang didukung oleh faktor geografis yakni iklimnya yang sejuk dan memiliki konsep wisata alam. Potensi alam yang dimiliki dikarenakan letak Kota Malang cukup tinggi, yakni 440-667 meter di atas

permukaan laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah pegunungan buring disebelah timur. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas barisan Gunung Kawi dan Panderman di sebelah barat, Gunung Arjuno sebelah utara, dan sebelah timur Gunung Semeru. Letak Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

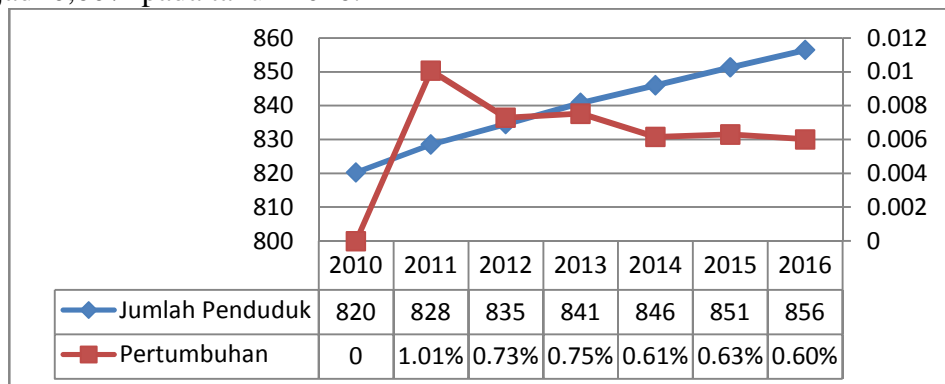
Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbangkertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.



Gambar 1.1 : Peta Wilayah Kota Malang

Sumber : pn-malang.go.id

Penduduk Kota Malang setiap tahunnya mengalami penambahan jumlah penduduk dari tahun 2010 berkisar pada 820 ribu jiwa menjadi 856 ribu jiwa pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya cenderung menurun berkisar pada 1,01 % pada 2011 menjadi 0,60% pada tahun 2016.



Gambar 1.2 :Jumlah Penduduk Kota malang (dalam ribu jiwa) 2010-2016

Sumber : pn-malang.go.id

Sebagai daerah Kota, Kota Malang tidak bergantung pada produksi hasil alam, melainkan lebih kepada sektor tersier, hal ini dapat dilihat pada data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, terlihat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Malang adalah sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel yang menyumbang 34% dari masyarakat Kota Malang pada usia produktif. Diikuti sektor jasa yang menyumbang 30% dan Industri Pengolahan sebesar 15%.

Mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah dibagi dua yakni, urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintahan wajib sendiri dibagi dua, yakni pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, Pelayanan dasar yang menjadi bahasan kali ini adalah pendidikan dan kesehatan. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang bekerja Menurut Pekerjaan Umum

Sedangkan tingkat kemiskinan, memiliki kondisi berbeda dengan ketimpangan, yakni kemiskinan semakin berkurang setiap tahunnya, akan tetapi ketimpangan memiliki dimensi yang lebih luas dari menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini dapat dijelaskan bahwa meski jumlah orang miskin berkurang, akan tetapi ketimpangan antara orang kaya dengan kalangan menengah lebih susah untuk dikurangi.

IPM Kota Malang memiliki trend yang baik, dikarenakan setiap tahunnya terus mengalami perbaikan, berkisar 76,69 pada tahun 2010 hingga 80,46 pada tahun 2016. Begitu pula pada ketiga indeks pembentuk IPM yakni Indeks Daya Beli, Indeks Pendidikan, dan Indeks Kesehatan, ketiga indeks ini menunjukkan terjadi peningkatan pada masing-masing indeks setiap tahunnya.

Dari sisi ketenagakerjaan ini, indikator yang dipakai adalah TPAK dan TPT. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja artinya indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Sedangkan TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka, merupakan indikator untuk mengukur pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka disini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

2. Rumusan Formula

Perhitungan dana transfer dapat dirumuskan berdasarkan tiga prinsip utama yaitu kebutuhan, kapasitas dan usaha (Heller and Pechman (1964), Turnbull (1969)). Dimana CRA (2017) mendefinisikan tiga prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Kebutuhan didefinisikan bahwa daerah yang memiliki populasi lebih banyak harus menerima bantuan lebih banyak. Prinsip ini dapat dicontohkan bila sebuah daerah dengan penduduk yang cukup banyak dan terdapat orang sakit, maka membutuhkan dana lebih banyak untuk perawatan kesehatan daripada daerah yang lebih sedikit penduduknya.
2. Kapasitas didefinisikan bahwa daerah dengan lebih banyak sumber daya dan mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri, maka menerima lebih sedikit dari

keseluruhan dana yang terkumpul. Ini setara dengan mengatakan bahwa keluarga kaya harus membayar lebih dari kantongnya sendiri untuk mendapatkan layanan, sementara keluarga miskin harus mendapat lebih banyak bantuan dari negara.

- Usaha (*effort*) didefinisikan bahwa daerah yang lebih berusaha membiayai dirinya sendiri seharusnya diberi imbalan lebih ketika mereka berusaha mengumpulkan uang sendiri dan membelanjakannya dengan bijak. Ini berarti pemerintah seharusnya tidak mengurangi jumlah dana yang diterima oleh daerah tersebut ketika mereka berhasil dalam usaha mereka untuk mengumpulkan lebih banyak dana sendiri.



Gambar 1 :Komponen Dana Transfer, Sumber : Hasil Kajian, 2017

Didalam formulasi Dana transfer ini digunakan tujuh parameter untuk memperkirakan DBH yang sesuai antara lain Populasi, *Equal Share*, *Poverty Index*, *Land Area*, *PE*, *Faktor Pertumbuhan*, *Fiscal Responsibility*.

1. *Population*

Populasi adalah suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu. Atau pengertian lainnya yaitu keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel. Melihat jumlah penduduk di suatu daerah adalah cara yang masuk akal untuk memulai memperkirakan permintaan akan layanan daerah. Populasi atau jumlah penduduk akan mengalami perubahan jumlah/ ukuran dari waktu ke waktu, hal ini dikenal sebagai dinamika populasi, dimana terjadipengurangan atau semakin sedikitnya jumlah populasi dalam kurun waktu tertentu. Ukuran populasi bisa berupa terletak di wilayah mana mereka berada, jumlah penduduk, dan presentase penduduk (Roads, 2014).

Mengetahui jumlah penduduk menjadi salah satu kebutuhan dalam memperoleh ukuran kebutuhan penduduk yang akurat. Dengan keterkaitan inilah maka data jumlah penduduk harus selalu di perlukan dalam setiap melakukan tindakan fungsi daerah. Populasi berkaitan erat dengan karakteristik jumlah penduduk. Besarnya penduduk suatu daerah mencerminkan kebutuhan pelayanan yang di perlukan. Untuk menunjukkan perbedaan kebutuhan antara satu daerah dengan daerah yang lain berdasarkan jumlah penduduk. Populasi adalah ukuran yang baik dari kebutuhan pengeluaran suatu daerah, ini adalah ukuran yang sederhana, objektif dan transparan yang memastikan prediktabilitas, data mengenai jumlah penduduk menyediakan alokasi pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi ke daerah. Parameter Populasi menjamin prediktabilitas ini dan juga memastikan transfer per kapita yang sama ke semua daerah. Selain itu, penggunaan populasi dalam formula juga memastikan bahwa daerah dapat

menjalankan fungsi yang dialokasikan kepadanya. Data yang digunakan untuk parameter ini didasarkan pada sensus penduduk (On & Allocation, 2015)

Menurut Mogulof (1973), Feiveson (2011) dan CRA (2017) penggunaan parameter populasi merupakan parameter yang baik, sederhana, objektif dan transparan untuk prediktabilitas kebutuhan pengeluaran suatu daerah. Dimana alokasi pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi tiap daerah dapat dijamin dengan parameter ini dan sebagai komponen transfer per kapita yang sama ke semua daerah. Penggunaan parameter ini juga memastikan bahwa setiap masyarakat diperlakukan sama, terlepas dari wilayah mana mereka berada. Alokasi tiap daerah berdasarkan parameter ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya. Parameter ini memungkinkan memperoleh bobot tertinggi dikarenakan bila terdapat daerah yang memiliki populasi yang tinggi, maka dapat mendapatkan kecukupan dana dalam melakukan fungsinya.

2. Basic Equal Share

Basic Equal Share, diartikan sebagai berikut (On & Allocation, 2015);

1. Penyediaan pembagian yang setara dalam sistem transfer dimaksudkan untuk menjamin pendanaan minimum untuk beberapa fungsi utama, seperti biaya administrasi pendirian dan pelaksanaan pemerintahan.
2. Ini didasarkan pada asumsi bahwa sejumlah pengeluaran, sampai batas tertentu, serupa untuk semua pemerintah daerah.

Ketentuan dasar pembagian yang sama dalam sistem transfer dimaksudkan untuk menjamin dana minimum sebagai kunci utama, seperti biaya administrasi mendirikan dan menjalankan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah pengeluaran sama di semua pemerintahan daerah. Namun, menggunakan pembagian yang sama bukan tanpa tantangan. Penggunaan berlebih pada pembagian yang sama dapat menyebabkan insentif dan inefisiensi yang buruk dalam pengalokasiannya karena di berbagai pemerintahan daerah tidak memiliki kebutuhan ataupun pengeluaran yang sama karena perbedaan ukuran seperti jumlah populasi, luas lahan dan lokasi geografis.(Roads, 2014).

Dan yang lebih penting lagi, penggunaan pembagian yang sama sebagai faktor dalam formula alokasi menimbulkan pertanyaan tentang dasar keadilan. Jika sistem pembagian yang sama digunakan sebagai prinsip alokasi, daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit akan menerima transfer yang jauh lebih besar per orang. Ini melanggar prinsip dasar keadilan dalam sistem pemerintahan pemerintahan daerah yang demokratis dan dapat menyebabkan tekanan untuk membentuk unit pemerintah daerah yang baru dan tidak dapat berjalan.

3. Proverty

Adapun Indeks kemiskinan memiliki karakteristik (On & Allocation, 2015);

1. Indeks kemiskinan memberikan ukuran kesejahteraan warga.
2. Parameter menggunakan indeks kesenjangan kemiskinan. Hal ini memastikan bahwa orang termiskin dari orang miskin mendapatkan alokasi tertinggi.
3. Indeks kemiskinan adalah proxy yang baik untuk kebutuhan pembangunan dan kesenjangan ekonomi antar negara.
4. Penggunaan parameter ini dalam formula menjamin alokasi pendapatan ke daerah tertinggal yang juga merupakan kabupaten dengan kebutuhan terbesar.

Indeks kemiskinan memberikan ukuran kesejahteraan warga.Oleh karena itu, menjadi sebuah proxy yang baik untuk kebutuhan perkembangan dan kesenjangan ekonomi antar daerah.Penggunaan parameter ini dalam formula menjamin alokasi pendapatan ke daerah tertinggal yang juga merupakan kabupaten dengan kebutuhan terbesar.

4. Land Area

Merupakan daerah dengan wilayah yang lebih luas harus mengeluarkan biaya administrasi tambahan untuk memberikan standar pelayanan yang setara kepada warganya. Penggunaan ukuran county (Land Area) sebagai parameter dalam formula pembagian pendapatan adalah mengkompensasi daerah untuk biaya tambahan yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan. Parameter didasarkan pada proporsi wilayah relatif terhadap negara, untuk pembagian pendapatan diinformasikan oleh fakta bahwa sebuah daerah dengan area yang lebih luas harus mengeluarkan tambahan biaya administrasi untuk memberikan standar pelayanan yang setara kepada warganya. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa perbedaan dalam biaya penyediaan layanan dapat meningkat dengan ukuran daerah, tetapi hanya pada yang rendah dan yang melampaui titik tertentu, biaya-biaya tambahan dapat diabaikan.

Lebih jauh lagi, penting untuk dicatat bahwa daerah dengan lahan kecil, juga harus menanggung biaya minimum tertentu dalam membangun mesin pemerintah dan biaya penyediaan layanan di beberapa kabupaten kecil ini mungkin lebih tinggi karena medannya. Dalam hal ini, Komisi dalam pembagian pendapatan pertama membatasi pangsa maksimum lahan sebesar 10 persen dan minimum satu persen. (On & Allocation, 2015)

Alokasi pendapatan ke daerah berdasarkan parameter lahan dalam formula bagi hasil pertama dimaksudkan untuk memberi daerah dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi biaya terkait dengan penyediaan layanan dan pengembangan infrastruktur. Mengingat bahwa luas wilayah sebuah daerah adalah tetap, tidak mungkin untuk menilai dampak dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan parameter ini yang dimaksudkan untuk infrastruktur. Akibatnya, parameter ini membuat formula pembagian pendapatan pertama menjadi formula statis. Rumus harus dinamis untuk memungkinkan tinjauan berkala untuk menilai dampaknya dalam hal mencapai tujuan yang ditentukan.

5. Fiscal Responsibility

Tanggung jawab fiskal, yaitu Pemerintah daerah menerima transfer, mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya publik. Tanggung jawab fiskal memerlukan penerapan praktik ekonomi dan anggaran yang masuk akal untuk memastikan warga mendapatkan nilai uang. Parameter pertanggungjawaban fiskal dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas usaha. Ini dihitung dari kenaikan pendapatan tahunan per kapita. Dengan menggunakan parameter ini, pemerintah berusaha ke daerah insentif untuk memaksimalkan pengumpulan pendapatan dan mendorong kehati-hatian fiskal daerah.

Berdasarkan ketentuan konstitusional dan legislatif di atas bahwa pemerintah pusat merekomendasikan agar pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan keuangan publik. Keobyektifan harus di samping untuk menentukan dasar pembagian sumber daya yang adil berisi mekanisme pemeriksaan mengenai tanggung jawab fiskal oleh pemerintah daerah. Meskipun beberapa pemangku kepentingan nasional dan daerah berpendapat bahwa parameter ini diturunkan dari formula, ada dukungan memadai untuk mempertahankan parameter dalam formula. Parameter ini memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya masyarakat digunakan dengan bijaksana. Parameter akan melembagakan penyusunan anggaran, penarikan dan penyerapan dana secara tepat waktu. Ini juga mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan probabilitas keuangan, dan merupakan insentif bagi negara untuk tumbuh.

6. *Development Factor*

Ini adalah salah satu parameter yang disarankan untuk dimasukkan oleh sejumlah pemangku kepentingan. Biasanya, indikator pembangunan ekonomi sosial yang digunakan mencakup lima komponen utama; kemiskinan, dinamika demografis, pendidikan, kesehatan dan pemukiman manusia. Namun, karena kemiskinan (dalam istilah metrik uang) adalah parameter yang berdiri sendiri dalam formula dan dinamika demografis seperti tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan, kesuburan dan migrasi total, ditangkap berdasarkan parameter populasi dan parameter lahan, faktor pengembangan ekonomi sosial ini formula pembagian pendapatan kedua mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, air dan infrastruktur, untuk menangkap dimensi kekurangan sosial masing-masing daerah.(Roads, 2014). Pendidikan pra-sekolah adalah fungsi yang dilimpahkan.Pendidikan, kesadaran masyarakat dan pelatihan merupakan katalisator kemajuan yang penting dalam masyarakat.Perampasan dalam komponen ini ditangkap oleh kehadiran di sekolah dasar dan melek huruf orang dewasa.

Imunisasi terhadap penyakit anak menular diukur dengan persentase populasi yang memenuhi syarat yang diimunisasi sesuai dengan kebijakan imunisasi nasional sebelum ulang tahun pertama mereka, mereka yang diimunisasi terhadap demam kuning (di daerah-daerah yang terkena dampak), dan proporsi wanita usia subur yang diimunisasi terhadap tetanus .Kurangnya imunisasi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang parah pada tingkat kesehatan primer.Yang sangat relevan adalah penyediaan program pencegahan yang ditujukan untuk mengendalikan penyakit menular dan melindungi kelompok rentan.Imunisasi mengurangi morbiditas dan mortalitas dan merupakan layanan kesehatan preventif yang baik.

Pengiriman di rumah sakit terkait dengan angka kematian ibu melahirkan yang memperkirakan proporsi ibu hamil yang meninggal karena sebab yang terkait atau diperparah oleh kehamilan atau penanganannya.Ini mencerminkan risiko pada ibu selama kehamilan dan kelahiran anak yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi, kondisi kesehatan yang tidak memuaskan sebelum kehamilan, timbulnya komplikasi kehamilan dan persalinan, dan ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Sanitasi dasar mengukur aksesibilitas penduduk ke fasilitas sanitasi yang memadai (termasuk jamban, toilet flush, septic tank, dll) dalam hal persentase penduduk dengan akses ke fasilitas sanitasi di tempat tinggal atau penyakit terkait yang mempengaruhi kualitas hidup. Diasumsikan bahwa ketersediaan fasilitas diterjemahkan ke dalam pemanfaatannya.

Infrastruktur yang baik adalah prasyarat bagi daerah manapun untuk mewujudkan pembangunan yang berarti.Parameter tersebut memberikan pengaruh terhadap kriteria bagi hasil yang memerlukan kebutuhan pembangunan daerah dan kesenjangan ekonomi antar kabupaten dipertimbangkan dalam alokasi pendapatan.Disparitas infrastruktur antar kabupaten meliputi infrastruktur jalan, air, kesehatan dan listrik.Penggunaan indeks infrastruktur sebagai bagian dari pembagian pendapatan antar pemerintah daerah akan mewujudkan tujuan yang sama dalam pemberian layanan dan redistribusi. Langkah-langkah yang dipilih untuk mengembangkan faktor infrastruktur daerah didasarkan pada fungsi pemerintah daerah yang mendasar, yaitu air, jalan dan listrik (Roads, 2014).

7. *Personnel Emolument Factor*

Staf dari pemerintah nasional yang menjalankan fungsi-fungsi yang dipindahkan di bawah sistem pemerintahan yang dilimpahkan dipindahkan ke pemerintah daerah.Selama periode pendapatan pertama, sejumlah pemerintah daerah telah mengemukakan kekhawatiran berdasarkan jumlah sumber daya yang telah mereka

habiskan untuk mendapatkan penghargaan personil. Telah diamati bahwa sejumlah pemerintah daerah, terutama yang berada di bekas markas provinsi, menghabiskan sebagian besar pendapatan yang ditransfer pada perwakilan personel. Kabupaten dengan biaya personil yang besar menunjukkan bahwa formula bagi hasil pertama sangat redistributif. Hal ini dicapai dengan mengorbankan penyampaian layanan. Untuk memastikan kabupaten dapat menjalankan fungsi yang dialokasikan kepadanya, Komisi perlu memberikan keseimbangan antara tujuan penyampaian layanan dan redistribusi dalam formula bagi hasil kedua.

Natural Revenue Governance Institute (NGRI) dan United Nation Development Program (UNDP), 2016 mengklasifikasi formula dana transfer sesuai dengan tujuan transfer yang diinginkan. Jika tujuan dari dana transfer untuk pembangunan daerah, maka pilihan indikator yang dapat dimasukkan dalam penyusunan formula antara lain, Tingkat Kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat upah, akses kesehatan dan pendidikan. Sedangkan jika tujuan dana transfer untuk mengurangi ketimpangan pendapatan wilayah, maka pilihan formulanya adalah memberikan bagi hasil yang sama pada semua daerah. Adapun indikator yang dapat dimasukkan dalam penyusunan formula adalah share PDRB daerah pada nasional, tingkat kemiskinan, ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik, dan lainnya).

3. Simulasi Anggaran Kelurahan dengan Formula

Didalam simulasi anggaran kelurahan, digunakan beberapa formula dengan beberapa variabel. Terdapat 5 formula dan dengan 5 simulasi anggaran kelurahan juga. Batasan Anggaran kelurahan minimal 5% dari APBD. APBD yang digunakan adalah APBD tahun 2017.

Simulasi I

Di dalam simulasi I, formula yang digunakan sebagai berikut:

$AK = AVE (IP + IW + IRW) \times TAD$, Dimana:

AK = Anggaran Kelurahan

AVE = Rata-Rata Indeks

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IRW = Indeks Jumlah RW

TAD = Total Alokasi Dana Kelurahan (5% dari APBD - DAK)

Hasil simulasi dengan formula di atas sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Simulasi I

No	Nama Kelurahan	Anggaran Kelurahan (Rp.)
1	Kelurahan Klojen	713,128,875.66
2	Kelurahan Rampal Celaket	594,850,586.72
3	Kelurahan Samaan	847,028,946.34
4	Kelurahan Kidul Dalem	696,996,091.06
5	Kelurahan Sukoharjo	749,530,851.09
6	Kelurahan Kasin	1,187,756,738.44
7	Kelurahan Kauman	960,299,716.72
8	Kelurahan Oro-Oro Dowo	1,154,702,775.61
9	Kelurahan Bareng	1,099,094,434.89
10	Kelurahan Gading Kasri	767,414,427.06
11	Kelurahan Penanggungan	876,233,610.37
12	Kelurahan Blimbing	1,210,776,249.01
13	Kelurahan Polowijen	982,255,374.76

No	Nama Kelurahan	Anggaran Kelurahan (Rp.)
14	Kelurahan Arjosari	825,537,146.05
15	Kelurahan Purwodadi	1,609,562,243.23
16	Kelurahan Pandanwangi	2,384,806,602.99
17	Kelurahan Purwantoro	2,583,316,716.13
18	Kelurahan Bunulrejo	2,258,073,870.11
19	Kelurahan Kesatrian	1,299,499,925.70
20	Kelurahan Polehan	1,175,134,577.82
21	Kelurahan Jodipan	899,214,739.20
22	Kelurahan Balarjosari	965,718,618.27
23	Kelurahan Kedungkandang	936,511,154.25
24	Kelurahan Kotalama	1,788,147,455.78
25	Kelurahan Mergosono	1,016,120,706.93
26	Kelurahan Bumiayu	1,769,134,122.84
27	Kelurahan Wonokoyo	1,783,955,927.99
28	Kelurahan Buring	2,174,764,154.40
29	Kelurahan Lesanpuro	2,052,556,095.81
30	Kelurahan Sawojajar	2,455,706,601.64
31	Kelurahan Madyopuro	2,301,208,278.61
32	Kelurahan Cemorokandang	2,118,451,151.49
33	Kelurahan Arjowinangun	1,445,073,673.82
34	Kelurahan Tlogowaru	1,507,211,712.85
35	Kelurahan Lowokwaru	1,615,399,970.56
36	Kelurahan Dinoyo	983,163,560.03
37	Kelurahan Sumbersari	906,615,905.36
38	Kelurahan Ketawanggede	600,778,054.48
39	Kelurahan Jatimulyo	1,695,212,393.01
40	Kelurahan Tunjungsekar	1,339,396,404.43
41	Kelurahan Mojolangu	2,283,897,303.04
42	Kelurahan Tulusrejo	1,598,989,532.99
43	Kelurahan Tasikmadu	1,072,176,707.40
44	Kelurahan Tunggulwulung	996,373,587.86
45	Kelurahan Tlogomas	1,341,182,785.39
46	Kelurahan Merjosari	1,881,622,262.37
47	Kelurahan Sukun	1,348,516,434.09
48	Kelurahan Ciptomulyo	863,933,652.31
49	Kelurahan Gadang	1,481,466,133.16
50	Kelurahan Kebonsari	925,169,534.98
51	Kelurahan Bandungrejosari	2,210,075,544.37
52	Kelurahan Tanjung Rejo	1,748,894,961.12
53	Kelurahan Pisangcandi	1,436,721,379.40
54	Kelurahan Karang Besuki	1,750,548,132.53
55	Kelurahan Bandulan	1,453,382,345.91
56	Kelurahan Mulyorejo	1,474,601,672.18
57	Kelurahan Bakalankrajan	1,030,789,926.92

Simulasi II

Formula yang digunakan dalam simulasi II sebagai berikut:

$$AK = AVE (IP + IW + IRW + IKPS) \times TAD$$

Dimana:

AK = Anggaran Kelurahan

AVE = Rata-Rata Indeks

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IRW = Indeks Jumlah RW

IKPS = Indeks Keluarga Pra Sejahtera

TAD = Total Alokasi Dana Kelurahan (5% dari APBD - DAK)

Hasil simulasi dengan formula di atas sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Simulasi II

No	Nama Kelurahan	Aanggaran Kelurahan (Rp.)
1	Kelurahan Klojen	715,416,682.69
2	Kelurahan Rampal Celaket	594,850,586.72
3	Kelurahan Samaan	847,028,946.34
4	Kelurahan Kidul Dalem	696,996,091.06
5	Kelurahan Sukoharjo	749,530,851.09
6	Kelurahan Kasin	1,187,756,738.44
7	Kelurahan Kauman	960,299,716.72
8	Kelurahan Oro-Oro Dowo	1,154,702,775.61
9	Kelurahan Barend	1,099,094,434.89
10	Kelurahan Gading Kasri	767,414,427.06
11	Kelurahan Penanggungan	876,233,610.37
12	Kelurahan Blimbing	1,210,776,249.01
13	Kelurahan Polowijen	982,255,374.76
14	Kelurahan Arjosari	825,537,146.05
15	Kelurahan Purwodadi	1,609,562,243.23
16	Kelurahan Pandanwangi	2,384,806,602.99
17	Kelurahan Purwantoro	2,583,316,716.13
18	Kelurahan Bunulrejo	2,258,073,870.11
19	Kelurahan Kesatrian	1,299,499,925.70
20	Kelurahan Polehan	1,175,134,577.82
21	Kelurahan Jodipan	899,214,739.20
22	Kelurahan Balearjosari	965,718,618.27
23	Kelurahan Kedungkandang	936,511,154.25
24	Kelurahan Kotalama	1,788,147,455.78
25	Kelurahan Mergosono	1,016,120,706.93
26	Kelurahan Bumiayu	1,769,134,122.84
27	Kelurahan Wonokoyo	1,783,955,927.99
28	Kelurahan Buring	2,174,764,154.40
29	Kelurahan Lسانpuro	2,052,556,095.81
30	Kelurahan Sawojajar	2,455,706,601.64
31	Kelurahan Madyopuro	2,301,208,278.61

No	Nama Kelurahan	Aanggaran Kelurahan (Rp.)
32	Kelurahan Cemorokandang	2,118,451,151.49
33	Kelurahan Arjowinangun	1,445,073,673.82
34	Kelurahan Tlogowaru	1,507,211,712.85
35	Kelurahan Lowokwaru	1,615,399,970.56
36	Kelurahan Dinoyo	983,163,560.03
37	Kelurahan Sumbersari	906,615,905.36
38	Kelurahan Ketawanggede	600,778,054.48
39	Kelurahan Jatimulyo	1,695,212,393.01
40	Kelurahan Tunjungsekar	1,339,396,404.43
41	Kelurahan Mojolangu	2,283,897,303.04
42	Kelurahan Tulusrejo	1,598,989,532.99
43	Kelurahan Tasikmadu	1,072,176,707.40
44	Kelurahan Tunggulwulung	996,373,587.86
45	Kelurahan Tlogomas	1,341,182,785.39
46	Kelurahan Merjosari	1,881,622,262.37
47	Kelurahan Sukun	1,348,516,434.09
48	Kelurahan Ciptomulyo	863,933,652.31
49	Kelurahan Gadang	1,481,466,133.16
50	Kelurahan Kebonsari	925,169,534.98
51	Kelurahan Bandungrejosari	2,210,075,544.37
52	Kelurahan Tanjung Rejo	1,748,894,961.12
53	Kelurahan Pisangcandi	1,436,721,379.40
54	Kelurahan Karang Besuki	1,750,548,132.53
55	Kelurahan Bandulan	1,453,382,345.91
56	Kelurahan Mulyorejo	1,474,601,672.18
57	Kelurahan Bakalankrajan	1,030,789,926.92

Sumber: Data diolah, 2017

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka di dalam upaya menyusun formula anggaran belanja Kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah dapat memperhatikan beberapa aspek berikut:

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu. Atau pengertian lainnya yaitu keseluruhan subjek penelitian atau jumlah keseluruhan dari suatu sampel. Populasi akan mengalami perubahan jumlah/ukuran dari waktu ke waktu, hal ini dikenal sebagai dinamika populasi, dimana terjadi pengurangan atau semakin sedikitnya jumlah populasi dalam kurun waktu tertentu. Ukuran populasi bisa berupa terletak di wilayah mana mereka berada, jumlah penduduk, dan presentase penduduk.

2. Basic Equal Share

Ketentuan dasar pembagian yang sama dalam sistem transfer dimaksudkan untuk menjamin dana minimum untuk daerah, seperti biaya administrasi mendirikan dan menjalankan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah pengeluaran sama di semua pemerintahan daerah. Namun, menggunakan pembagian yang sama bukan tanpa tantangan. Penggunaan berlebih pada pembagian yang

samadapat menyebabkan insentif dan inefisiensi yang buruk dalam pengalokasiannya karena di berbagai pemerintahan daerah tidak memiliki kebutuhan ataupun pengeluaran yang sama karena perbedaan ukuran seperti jumlah populasi, luas lahan dan lokasi geografis.

Kedua, dan yang lebih penting lagi, penggunaan *basic equal share* sebagai faktor dalam formula alokasi transfer menimbulkan pertanyaan tentang dasarkeadilan. Jika sistem pembagian yang sama digunakan sebagai prinsip alokasi, daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit akan menerima transfer yang jauh lebih besar per orang. Ini melanggar prinsip dasar keadilan dalam sistem pemerintahan pemerintahan daerah yang demokratis dan dapat menyebabkan tekanan untuk membentuk unit pemerintah daerah yang baru dan tidak dapat berjalan.

3. *Poverty*

Indeks kemiskinan memberikan ukuran kesejahteraan warga. Oleh karena itu, indicator ini dapat menjadisebuah *proxy* yang baik untuk kebutuhan perkembangan dan kesenjangan ekonomi antar daerah. Penggunaan parameter ini dalam formula menjamin alokasi pendapatan ke daerah tertinggal dan daerah dengan kebutuhan terbesar.

Ada beberapa ukuran kemiskinan, kemiskinan dapat diukur dengan proporsi penduduk yang miskin berdasarkan asupan kalori minimum dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan non-pangan yang mendasar. Tidak semua otoritas wilayah mengukur kedalaman kemiskinan sehingga memperlakukan semua orang miskin sebagai kelompok yang homogen, padahal sebenarnya intensitas kemiskinan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Orang miskin dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang dengan berbagai hasil.

4. *Land Area*

Penggunaan ukuran daerah/wilayah (Land Area) sebagai parameter dalam formula bagi hasil pendapatandiperkuat oleh fakta bahwa sebuah daerah dengan area yang lebih luas harus mengeluarkan tambahan biaya administrasi untuk memberikan standar pelayanan yang setara kepada warganya. Selain itu, luas wilayah juga dapat menggambarkan tingkat kesulitan medan/geografis.

Alokasi pendapatan ke daerah berdasarkan parameter lahan dalam formula bagi hasil dimaksudkan untuk memberi kabupaten dengan sumber daya yang memadai untuk memenuhi biaya terkait dengan penyediaan layanan dan pengembangan infrastruktur.

5. *Fiscal Responsibility*

Pemerintah daerah menerima transfer, mengumpulkan dan memanfaatkan sumber daya publik. Pejabat publik diharuskan untuk memastikan keuangan publik yang dipercayakan kepada mereka tidak hanya digunakan untuk tujuan-tujuan mereka, tetapi juga digunakan dengan hati-hati. Tanggung jawab fiskal memerlukan penerapan praktik ekonomi dan anggaran yang rasional untuk memastikan warga mendapatkan nilai uang. Tanggung jawab fiskal memerlukan tindakan yang disengaja untuk memperkuat kerangka hukum antikorupsi, etika dan integritas; promosi jabatan berbasis hasil dalam pelayanan publik; akses publik terhadap informasi dan data; memperkenalkan pengawasan sipil di sekitar institusi hukum, keadilan dan keamanan; dan memperkuat kapasitas pengawasan legislatif DPR.

Parameter pertanggungjawaban fiskal bervariasi tergantung pada disiplin fiskal daerah, dengan komponen yang sama untuk memungkinkan pemerintah mengelola sistem pengelolaan keuangan yang tepat. Disiplin fiskal dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan daerah sebagai proporsi total penerimaan belanja daerah terhadap rasio rata-rata di semua daerah.

6. *Development Factor*

Development factor adalah salah satu parameter yang disarankan kepada pengambil kebijakan dalam alokasi DBH. Pada umumnya, indikator pembangunan ekonomi sosial yang digunakan mencakup lima komponen utama: kemiskinan, dinamika demografis, pendidikan, kesehatan dan pemukiman masyarakat. Namun, karena kemiskinan dan dinamika demografis adalah parameter yang berdiri sendiri dalam formula, maka *Development factor* dapat diproxy dengan indikator pendidikan, kesehatan, air dan infrastruktur.

Indikator pendidikan dapat didekati dengan angka melek huruf, angka partisipasi sekolah. Sementara itu, untuk indikator kesehatan dapat didekati dengan tingkat imunisasi terhadap penyakit anak menular, angka kematian ibu melahirkan, sanitasi dasar (misalnya jamban, kamar mandi). Sedangkan indikator infrastruktur dapat didekati dengan infrastruktur jalan, air, dan listrik.

7. *Personnel Emolument Factor*

Personnel Emolument Factor digunakan sebagai salah satu parameter dalam model karena telah diamati bahwa terdapat transfer dalam jumlah besar yang disebabkan oleh rumitnya birokrasi pemerintahan. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah staf pemerintah daerah, khususnya mantan staf dari tingkat provinsi atau nasional, menghabiskan lebih banyak transfer pendapatan karena masalah birokrasi.

SARAN

- a. Formula yang disusun didalam menentukan besaran anggaran kelurahan harus memenuhi beberapa kriteria di dalam sebuah formula, diantaranya: *revenue adequacy, equity, predictability, simplicity and transparency*, dan memberikan *incentive* bagi daerah dalam mendorong *effort* untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Dengan memperhatikan konsep dan telaah teori, maka indikator-indikator yang memungkinkan di dalam formula anggaran belanja kelurahan di Kota Malang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan data yang memadai. Adapun indikator yang dapat diusulkan antara lain:
 1. Jumlah penduduk setiap kelurahan
 2. Jumlah penduduk miskin di setiap kelurahan
 3. Luas wilayah setiap kelurahan
 4. Jumlah Rukun Warga di masing-masing kelurahan
 5. Rasio jumlah pegawai kelurahan terhadap penduduk kelurahan
 6. Realisasi pajak di setiap kelurahan.
 7. Tingkat inovasi di masing-masing kelurahan
 8. Tingkat penyerapan anggaran masing-masing kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Malang, 2017. Kota Malang Dalam Angka 2017.
- Commission on Revenue Allocation (CRA) Kenya, 2010 CRA Recommendation On The Criteria For Sharing Revenue Among Counties For Financial Years.
- Devas, Nick. 2002. Issues in Fiscal Decentralisation: Ensuring Resources Reach the (Poor at) the Point of Service Delivery. Workshop on Improving service Delivery in Developing Countries. Birmingham.
- Hamid, Edy Suandi, 2005, Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU): Upaya Mengatasi
- Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, UII Press.
- Hyman, David N., 1996, *Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy*, edisi kelima, The Dryden Press, Fort Worthn.

- Jun. Ma, 2005. Intergovernmental Fiscal Transfers in Nine Countries: Lessons for Developing Countries. Policy Research Working Papers- World Bank Wps, (September), ALL.
- Lewis, B.D. 2015. *Decentralising to Villages in Indonesia: Money (and Other) Mistakes, Public Administration and Development 2015*. Wiley Online Library.
- Musgrave, Richard A. and Musgrave, Peggy A. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Fifth Edition, McGraw-Hill Inc, New York etc.
- NRGI and UNDP. 2016. Natural Resource Revenue Sharing. https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_undp_resource-sharing_web_0.pdf. Diakses Oktober 2017.
- On, C., & Allocation, R. (2015). Promoting an Equitable Society Brief On The Cra Recommendation On The Basis Concerning Equitable Sharing Of Revenue Among The County Governments Senate Committee On Finance Commerce And Economic Affairs.
- Otieno, Jackson Ongong'a, Paul A. Odundo, Charles M. Rambo. 2014. Influence Of Local Authority Transfer Fund On Service Delivery By Local Government Authorities In Kenya. *International Journal Of Management And Marketing Research*, Volume 7 Number 1 2014.
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Romeo, L. G. 2004. Decentralization Reforms and Commune-Level Services Delivery in Cambodia.
- Roads, C. (2014). Commission On Revenue Allocation Cra Recommendation On The Criteria For Sharing Revenue Among Counties, (November 2014)
- Schroeder, Larry .Paul Smoke Smoke. 2002. *Intergovernmental Fiscal Transfers: Concepts, International Practice, and Policy Issues*. New York University. New York.
- Shah, A. 2012. A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers. *Revista de Economía Estadística*, XLIV(2), 127–191. doi:10.1596/1813-9450-4039.
- Shah, Anwar, Qibthiyah, Riatu, dan Astrid Dita. 2012. General Purpose Central Provincial Local Transfers (DAU) in Indonesia, From Gap Filling to Ensuring Fair Access to Essential Public Services. *World Bank Working Paper*.
- Shah, Anwar dan Qureshi, Zia. 1994. *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia*. *World Bank Discussion Paper No.239*. Washington DC : The World Bank.
- Siddik, Machfud, 2007. A new perspective of intergovernmental fiscal relations: lessons from Indonesia's experience. Ripege. Jakarta
- Tambunan, Tulus. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta : Salemba Empat.
- The Office of Policy and Management. 2010. A Review of Regional Tax-Based Revenue Sharing Programs and the Establishment of Regional Asset Districts. The Planning and Development and Finance, Revenue and Bonding Committee of the Connecticut General Assembly.
- Yilmaz, Serdar. 2003. *Intergovernmental Transfers: Concepts and Policy Issues*. Conference of World Bank Institute and Korea Development Institute, Seoul, Korea, July 21~23, 2003.